

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengkajian mengenai pendidikan formal, terutama yang terkait dengan proses belajar mengajar tidak bisa dipisahkan dari persoalan kurikulum. Kurikulum menjadi semacam barometer tersendiri berhasil tidaknya proses pengajaran. Yang perlu digarisbawahi adalah kurikulum tidak hanya identik dengan satuan mata pelajaran saja. Menurut Hilda Taba, seperti dikutip oleh Nasution, kurikulum tidak boleh didefinisikan terlalu luas namun juga tidak terlalu sempit.¹ Semua aspek yang terkait dengan pendidikan seperti metode belajar, sasaran-sasaran pembelajaran, juga termasuk dalam lingkup kurikulum. Dengan merujuk kepada ‘regulasi akademik’ tersebut diharapkan proses pendidikan akan berjalan secara sistematis dan memiliki orientasi yang jelas. Sebab arah pendidikan di samping sebagai media peningkatan penguasaan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan, juga merupakan sarana pengembangan nilai-nilai normatif dalam rangka membentuk jati diri peserta didik.²

Bagaimanapun bentuk atau model suatu lembaga pendidikan -termasuk jenis pesantren-, sudah barang tentu menempatkan kurikulum sebagai landasan penting proses belajar mengajar walaupun dalam aplikasi di tingkat institusi

¹ S. Nasution, *Asas-asas Kurikulum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Edisi. 2, Cet. 2, hlm. 7

² Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 4

berbeda-beda karena disesuaikan dengan kondisi riil suatu lembaga. Meskipun pesantren selama ini dikenal konservatif dan identik dengan wilayah Islam tradisional, pada dasarnya pesantren tetap membuka diri bagi perubahan. Bahkan secara historis, menurut pandangan Nurcholish Madjid pesantren tidak hanya mengandung makna keislaman, tapi juga keaslian indigenous Indonesia.³

Pesantren sebagai institusi bersahaja seringkali mendapat stigma miring sebagai kamufase kehidupan, karena selalu berkutat dengan persoalan akhirat. Kemudian pesantren juga dicerca sebagai pusat kehidupan fatalis, karena perannya memproduksi pola kehidupan yang meninggalkan dunia materi (zuhud). Bahkan yang lebih ‘kasar’ ialah ketika pesantren dinobatkan sebagai pusat radikalisme, yang menggoyahkan posisi pesantren sebagai ‘kampung peradaban’.⁴ Kenyataan pahit ini tidak membuat pesantren terkubur lalu hilang dalam cercaan. Hal ini justru memicu kerja keras yang mengubah wajah pesantren semakin tertata dan dewasa dalam menghadapi tuduhan keliru. Tapi tetap saja perkembangan sosio-kultural dan politik pasca merebaknya isu terorisme semakin tidak menguntungkan pesantren. Kegelisahan pesantren cukup beralasan karena mereka berhadapan dengan kepentingan global yang ‘dilegitimasi’ pemerintah.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, posisi dan keberadaan pesantren sebenarnya memiliki tempat yang istimewa. Namun, kenyataan ini belum disadari oleh mayoritas masyarakat

³ Nurcholish Madjid, *Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Pesantren*, dalam: Dawam Raharjo (Ed), *Pergulatan Pesantren*, (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1985), hlm.3

⁴ Djohan Efendi, *Pesantren dan Kampung Peradaban (Sebuah Pengantar)*, dalam: Hasbi Indra, *Pesantren dan Transformasi Sosial: Studi Atas Pemikiran K.H. Abdullah Syafi 'ie dalam Bidang Pendidikan Islam*, Hasan M. Nur (Ed), (Jakarta: PENAMADANI), Cet.1, hlm. xvii.

muslim khususnya yang berkecimpung di dunia pesantren. Karena kelahiran Undang-undang ini masih sangat belia dan belum sebanding dengan usia keberadaan pesantren di Indonesia. Keistimewaan pesantren dalam sistem pendidikan nasional dapat dilihat dari ketentuan dan penjelasan pasal-pasal dalam Undang-undang Sisdiknas sebagai berikut; dalam Pasal 3 UU Sisdiknas dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁵ Ketentuan ini tentu saja sudah berlaku dan diimplementasikan di pesantren. Bahkan pesantren sudah sejak lama menjadi lembaga yang berperan membentuk watak dan peradaban bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbasis pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. serta berakhlak mulia.

Kemudian ketentuan dalam Bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, pada Pasal 4 dijelaskan bahwa:

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

⁵ Undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab.II Pasal 3

- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.⁶

Semua prinsip penyelenggaraan pendidikan tersebut sampai saat ini masih berlaku dan dijalankan di pesantren. Karena itu, pesantren sesungguhnya telah mengimplementasikan ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan sistem pendidikan nasional dan cita-cita bangsa.

Tidak hanya itu, keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang didirikan atas peran serta masyarakat, telah mendapatkan legitimasi dalam Undang-undang Sisdiknas. Ketentuan mengenai Hak dan Kewajiban Masyarakat pada Pasal 8 menegaskan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Sedangkan dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan ini berarti menjamin eksistensi dan keberadaan pesantren sebagai

⁶ Undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab.III Pasal 4.

lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan diakomodir dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini selanjutnya dipertegas lagi oleh Pasal 15 tentang jenis pendidikan yang menyatakan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Artinya dari segi kompetensi pesantren adalah representasi dari pendidikan yang concern di bidang keagamaan.

Fungsi utama pesantren sesungguhnya sangat sederhana yaitu mensinergikan pelaku pendidikan yakni tenaga pendidik dan santri, dengan materi yang menjadi objek kajian dalam suatu lingkungan tersendiri. Kemandirian dalam mengelola sistem pembelajaran inilah yang terkadang diartikan sebagai eksklusif, anti sosial, dan semacamnya. Objek kajian yang dimaksud memang berorientasi keagamaan tetapi tetap dalam kerangka kurikulum nasional. Dengan kata lain fungsi kurikulum -secara tidak langsung- sudah diterapkan oleh kalangan pesantren secara konsisten sebagai syarat tercapainya tujuan-tujuan pendidikan nasional, meskipun dalam konteks yang lebih sederhana. Dalam kesederhanaannya, kenyataan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan sepanjang hayat (life long integrated education) di sebagian besar pondok pesantren telah berjalan dengan sangat baik dan konsisten. Selain itu kiprah pesantren dalam berbagai hal amat sangat dirasakan oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah, selain sebagai sarana pembentukan karakter dan pencetak kader-kader ulama, pesantren merupakan bagian dari khazanah pendidikan Islam Indonesia yang setia berada dalam barisan ‘apa adanya’.

Perjumpaan pesantren dengan kurikulum merupakan sebuah keharusan karena kedudukannya yang cukup sentral dalam dunia keilmuan. Menurut Azyumardi Azra, karena kedudukannya sebagai lembaga pendidikan indigenous, pesantren memiliki akar sosio-historis yang cukup kuat.⁷ Dengan bekal tersebut pesantren mampu bertahan di tengah gelombang perubahan berbagai sisi kehidupan menyangkut ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dalam konteks keilmuan, Azyumardi berpendapat paling tidak pesantren memiliki tiga fungsi pokok. Pertama, transmisi ilmu pengetahuan Islam (transmission of Islamic knowledge); kedua, pemeliharaan tradisi Islam (maintenance of Islamic tradition); ketiga, pembinaan calon-calon ulama (reproduction of ulama).⁸ Dilihat dari tanggungjawab pesantren yang cukup besar terhadap tiga hal di atas maka agaknya pembaharuan terhadap kurikulum khususnya aspek pembelajaran merupakan kebutuhan mendesak.

Secara etimologi kata kurikulum berasal dari bahasa Latin, currere yang artinya berlari cepat dan tergesa-gesa. Kemudian makna lainnya kurikulum diartikan ‘kumpulan subjek yang diajarkan di sekolah, atau arah suatu proses belajar’. Ada pula yang mengartikannya sebagai “perangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran dalam kegiatan belajar mengajar”.⁹

Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia , kurikulum didefinisikan

⁷ Azyumardi Azra, *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), Cet.1, hlm. 87

⁸ Azyumardi Azra, *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, hlm. 89

⁹ Abdul Rahman shaleh, *Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Visi, Misi, dan Aksi (Jakarta: PT. Gemawindu Pancaperkasa, 2000), cet. 1, hlm. 39

sebagai susunan rencana pelajaran.¹⁰ Pada perkembangan selanjutnya kurikulum menjadi istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan satuan mata pelajaran yang harus ditempuh guna mencapai suatu gelar atau untuk memperoleh ijazah.¹¹

Kecenderungan perluasan makna dalam mengartikan kurikulum tak lepas dari semakin berkembangnya fenomena pendidikan dengan segala sistem yang dianut suatu lembaga pendidikan. Dengan merujuk kepada ‘rencana belajar’ tersebut diasumsikan proses pendidikan akan berjalan secara sistematis dan teratur serta memiliki orientasi yang jelas yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebab pada dasarnya tujuan pendidikan adalah peningkatan penguasaan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan pengembangan nilai-nilai normatif dalam rangka membentuk jati diri peserta didik.¹² Artinya di samping prasarana yang memadai seperti tempat belajar, instrumen belajar, dan pendidik, kurikulum tentunya memiliki peran strategis. Hal ini sekaligus juga mengindikasikan bahwa dalam pencapaian sebuah tujuan membutuhkan integritas yang tertata dengan baik antar komponen- komponen pendukung.

Untuk mengembangkan kurikulum, dibutuhkan prinsip-prinsip praktis dan integral yang dapat memberikan petunjuk pada permasalahan dan pengambilan keputusan tentang tujuan dan langkah yang diperlukan untuk mencapai pendidikan yang efektif dan komprehensif. Menurut pendapat Jusuf Amir, setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum,

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 543

¹¹ Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), cet.1, hlm.

¹² Prof.Dr. Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 4

yaitu:¹³ pertama , setiap ilmu memiliki nilai dasar; kedua , proses pembelajaran itu melatih perkembangan dan intelektual; dan ketiga, pendidikan harus memungkinkan dapat dipergunakan atau dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu maka manfaat dari pengembangan kurikulum tersebut tidak hanya bagi kalangan pendidikan tapi juga mengakomodir kebutuhan masyarakat. Selain itu menurut S. Nasution,¹⁴ dalam penyusunan dan perencanaan kurikulum sangat membutuhkan pertimbangan psikologis di samping pertimbangan akademis sebagai landasan dasar. Sebab dalam penerapannya kurikulum akan terus berhadapan dengan pribadi yang berbeda-beda. Pertimbangan-pertimbangan pengembangan kurikulum menjadi ‘menarik’ ketika proses tersebut terjadi di dalam institusi bernama pesantren. Karena, segala proses yang berlangsung di pesantren secara hirarkis harus melewati persetujuan pimpinan pondok pesantren yaitu kyai.

Di Indonesia khususnya pada lembaga-lembaga pendidikan, persoalan-persoalan pendidikan yang di dalamnya termasuk kurikulum memang belum menjadi ‘prioritas utama’ seperti yang terjadi di negara-negara barat yang secara konsisten menempatkan kurikulum sebagai sesuatu yang ‘sangat penting’ bagi pendidikan tanpa harus terpengaruh oleh perubahan ekonomi, sosial dan politik. Kondisi kritis kualitas pendidikan pesantren di negeri ini idealnya memang menjadi keprihatinan semua pihak karena berkaitan dengan eksistensi generasi mendatang yang lebih baik. Perlu dicatat bahwa pemerintah merupakan otoritas yang paling bertanggungjawab secara konstitusional untuk memberikan

¹³ Jusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), cet.1, hlm. 59

¹⁴ S. Nasution, *Asas-asas Kurikulum* , (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Edisi. 2, Cet. 2, hlm. 57

pendidikan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat dalam kondisi apapun. Sehingga diharapkan usaha pemerintah untuk mendobrak kebuntuan peningkatan mutu pendidikan tidak bersifat diskriminatif terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan. Sikap mengucilkan pesantren sama saja dengan mengingkari akar-akar budaya pendidikan Islam di Indonesia.

Bila hanya untuk sekedar melestarikan keberadaan pesantren, menurut Saifullah Maksum tidaklah terlalu sulit. Sampai saat ini eksistensi pesantren secara kuantitatif tidak mengalami penurunan, bahkan cenderung meningkat dengan bermunculan pesantren-pesantren baru yang didirikan oleh para alumni pesantren yang lebih tua. Tetapi keberadaan ini tidak signifikan bila dihadapkan pada segi kualitas. Munculnya lembaga pendidikan modern di perkotaan, yang berbasis dan berorientasi agama, serta dikelola secara profesional oleh kalangan muda muslim yang terjun profesional, agaknya ikut mempengaruhi perubahan sikap dan cara pandang sejumlah kalangan terhadap pesantren. Memang tujuan dari lembaga pendidikan Islam modern ini bukan untuk melahirkan ahli agama, namun hanya untuk membentuk generasi yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan ajaran agama, di samping memiliki wawasan pengetahuan umum sebagai bekal memasuki sektor modern. Tujuan sederhana tersebut ternyata justru dinilai lebih praktis dan menjadi kebutuhan ideal keluarga muslim dewasa ini.¹⁵

Namun pandangan di atas tidak serta merta menjadi tolak ukur kemunduran pesantren. Sebab pada sisi masih banyak orang yang berpandangan optimis terhadap peran pesantren sebagai pencetak kader saleh dalam beragama,

¹⁵ Saifullah Maksum (Ed), *Dinamika Pesantren* (Telaah Keberadaan Pesantren Saat ini) , (Jakarta: Yayasan Islam al-Hamidiyah dan Yayasan Saifuddin Zuhri, 1998), Cet. 1, hlm. 38

sebab dari segi lingkungan, santri setiap saat terbiasa bergelut dengan materi dan kegiatan keagamaan. Tetapi tetap saja secara jujur harus diakui para santri ini mengalami kegamangan budaya ketika mereka meninggalkan pesantren. Hal ini muncul ketika mereka melihat sesuatu yang ‘baru’ yang tidak mereka jumpai saat di pesantren seperti pergaulan yang lebih bebas, cara berpikir yang lebih sekuler, dan berbagai tradisi yang langka di pesantren. Bila tidak mampu mengontrol diri maka menjadi sia-sia keberadaan mereka yang lama di pesantren. Persoalan ini yang mungkin belum diantisipasi secara maksimal oleh kalangan pesantren.

Dalam sejarah panjang politik bangsa Indonesia sebenarnya komunitas pesantren selalu berada dalam lingkaran yang cukup diperhitungkan, karena jumlah massa yang menggiurkan partai. Kelompok-kelompok (baca: partai politik) yang mengklaim berazaskan Islam seringkali ramai-ramai sowan ke berbagai pesantren untuk merebut empati kalangan pesantren. Ironisnya sejarah juga mencatat berulang kali komunitas pesantren pula yang pertama menjadi ‘barisan sakit hati’. Pada saat pertarungan politik berakhir dan telah melahirkan sebuah kekuasaan baru atas dukungan massa pesantren, pola pendidikan di pesantren tak kunjung membaik. Bahkan pemerintah terpilih bersikap antipati terhadap pesantren, sejak maraknya isu terorisme yang diyakini bermuara pada ajaran pesantren. Dalam kaitannya dengan kekecewaan yang mendalam terhadap partai-partai Islam, Cak Nur pernah melontarkan gagasan “Islam, Yes; Partai Islam, No!”.¹⁶ Agaknya gagasan tersebut cukup beralasan. Buktinya, ketika isu terorisme menggurita di negeri ini dan pesantren menjadi ‘tersangka’ berbagai

¹⁶ Nurcholish Madjid, *Islam Kemoderenan dan Keindonesian*, (Bandung: Mizan, 1995), Cet. Ke-8, hlm.205

aksi terror dan dituduh sebagai institusi ekstrem yang memproduksi kelompok radikal, tak ada satu pun pembelaan yang layak bagi pesantren. Lebih tragis lagi, atas dasar kewenangan dan kekuasaan (*power and authority*) sistem pengajaran pesantren -yang dianggap- fundamental seperti pondok pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, pimpinan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir mulai diawasi pemerintah dengan dalih meminimalisir ajaran radikal yang melahirkan para teroris. Hal ini memperlihatkan demokratisasi sistem pembelajaran di pesantren telah dibatasi oleh pemerintah tanpa mempertimbangan dampak psikologis dunia pendidikan (Islam) khususnya.¹⁷

Meningkatnya kuantitas pesantren dengan spesialisasi dan ragam kajian, dari mulai pesantren tradisional (salaf) hingga pesantren modern (khalaf)¹⁸ yang telah menerapkan sistem pengajaran konvensional membawa implikasi positif bagi pendidikan nasional umumnya dan juga pendidikan Islam khususnya serta merupakan aset bangsa yang sangat berharga, karenanya menjadi penting untuk terus melestarikannya. Tapi sekali lagi wujud pelestarian itu tidak harus melalui 'tendensi' yang berlebihan dari kalangan penguasa, sehingga dapat memudahkan keaslian budaya pesantren. Perkembangan pesantren yang melalui rentang waktu panjang dalam sejarah Islam Indonesia telah memperlihatkan sebuah sumbangan berharga 'kaum tradisional Islam' bagi kemajuan pendidikan di negeri ini. Menjadi tidak etis bila kemudian institusi pesantren yang telah berjuang secara simultan bagi kecerdasan bangsa sejak bangsa ini masih

¹⁷ S. Nasution, *Asas-asas Kurikulum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Edisi.2, Cet.2, hlm. 12

¹⁸ Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2001), Cet. 1, hlm. 159

terjajah, lalu kemudian diasingkan karena dianggap sebagai sarang teroris dan harus diberangus. Sebuah ending yang tidak diharapkan.

Beberapa problematika teknis pengembangan kurikulum pesantren secara perlahan mulai teratasi seiring meningkatnya kesadaran komunitas pesantren terutama kyai. Permasalahan yang berbenturan dengan persoalan kurikulum terus dimaksimalkan penyelesaiannya sehingga kurikulum menjadi lebih luwes dan fleksibel. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar pesantren yang ideal, sejatinya terbebas dari persoalan apapun, hal ini akan memungkinkan santri mengekspresikan diri secara bebas tentang cara berpikir kritis, progresif, bertradisi ilmiah, serta menumbuhkan rasa percaya diri dalam berpendapat. Proses yang tanpa ‘tekanan’ seperti ini akan mampu mengidentifikasi tingkat perkembangan belajar setiap santri sehingga segera pula mencari solusi bila ada hambatan-hambatan tertentu yang muncul kemudian.

Namun bila dicermati proses perubahan kurikulum yang terjadi dalam institusi pesantren, corak perubahannya tidaklah terlalu mendalam sehingga tidak mencabut akar tradisi kurikulum pesantren yang cukup konsisten dengan nilai-nilai spiritual. Pada sisi lain, kondisi tersebut menyebabkan antara tradisi lama dengan unsur-unsur baru yang datang belakangan tidak bisa dipisahkan secara tegas. Meskipun begitu pembagian pesantren menjadi pesantren tradisional dan pesantren modern tetap tak dapat dihindarkan sebab masyarakat memang memandang ada perubahan struktur keilmuan dalam pesantren dibanding masa-masa awal kemunculannya yang hanya mengajarkan kitab-kitab klasik dalam bidang fiqh, teologi, dan tasawuf.

Pondok pesantren Zainul Hasan yang akan menjadi objek penelitian ini yang dalam keberadaannya masih eksis tersebut pesantren ini telah melewati berbagai perubahan sosial dan tiga kali pergantian kepemimpinan. Lembaga ini dilahirkan sebagai suatu pengembangan wawasan dan pengembangan daya tampung dengan sistem pendidikan serta pengajaran yang lebih variatif dan memenuhi hajat umat serta memberikan prospek yang sangat baik untuk sebuah sarana pendidikan. Sasaran siswa yang ditargetkan untuk menuntut ilmu di Pondok Pesantren Zainul Hasan bukan hanya warga sekitar pesantren, namun lebih jauh lagi adalah seluruh rakyat Indonesia yang ingin memperdalam ilmu umum sekaligus ingin memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam yang baik.¹⁹ Pesantren ini didirikan dengan berbagai pertimbangan yang matang, salah satunya adalah untuk mengakomodir sejumlah kelemahan pondok pesantren Daar yang dari segi sarana dirasa memiliki kendala. Pertimbangan penting lain adalah K.H. Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah yang merupakan pengasuh pondok, menginginkan sebuah pesantren yang bernuansa sejuk, asri, menyenangkan dan representatif untuk mengembangkan nilai-nilai keislaman secara khusus.

Letak pesantren Zainul Hasan yang berada di daerah subur yang hijau dan dialiri sungai, merupakan tempat belajar yang rekreatif dan memukau. Ketika berada dalam pesantren ini akan langsung terasa nuansa religius yang kental. Layaknya pondok pesantren pada umumnya kegiatan keagamaan yang harus dijalankan santri sangat padat; seperti sholat berjamaah lima waktu, membaca al-Qur'an, muhadharah (latihan pidato), dan ditambah lagi dengan kegiatan

¹⁹ Soleh Rosyad, Kiprah Kyai Enterpreneur: *Sebuah Pembaharuan Dunia Pesantren di Jawa Timur*, Editor: Nanang Tahqiq, et.al., (Genggong: LPPM Zainul Hasan, 2005), Cet.1, hlm. 96

ekstrakurikuler seperti kepramukaan, keputrian, dan Marching Band. Namun yang membedakan pesantren Zainul Hasan dengan pesantren lain di sekitarnya adalah alumni pesantren Zainul Hasan dibekali dua buah ijazah, yakni; ijazah pesantren yang diterbitkan secara mandiri dan ijazah SLTP/SMU yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Kelebihan ini tampaknya belum dimiliki oleh beberapa pesantren yang terdapat di kabupaten Probolinggo. Sehingga menjadi menarik untuk meneliti lebih jauh tentang sisi lain pesantren ini terutama dari segi kurikulum yang diterapkan. Pesantren ini secara terbuka mengakui bahwa pondok modern Gontor merupakan ‘rujukan’ dalam penyelenggaraan proses belajar mengajarnya, terutama dalam hal satuan mata pelajaran. Sedangkan untuk mata pelajaran umum pesantren ini mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Desa Karangbongtempat berdirinya pondok pesantren Zainul Hasan merupakan sebuah desa yang masuk dalam wilayah kecamatan Pajarakan, kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur. Secara geografis letak desa ini cukup strategis karena berada tidak jauh dari jalan raya propinsi yang menghubungkan wilayah Jawa Barat dan kepulauan Bali. Kondisi ini menjadikan akses menuju pesantren Zainul Hasan dapat ditempuh dari dua arah, sehingga tak heran jika dalam usianya yang sudah tua, pesantren Zainul Hasan masih sangat diminati masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya santri yang berasal dari luar Jawa seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali dan beberapa daerah lainnya.

Wilayah Jawa Timur yang agamis memang sejak dulu dikenal sebagai basis pengembangan pengajaran Islam yang cukup kuat. Menurut data yang pernah dikeluarkan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Indonesia,²⁰ paling tidak ada sekitar 1.793 pesantren di propinsi Jawa Timur (Jawa Timur dulu masih merupakan bagian dari Jawa Barat). Jumlah tersebut merupakan yang terbesar dibanding dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia. Khusus kabupaten Probolinggo, jenis pesantren masih didominasi oleh pesantren salaf (tradisional), bahkan kabupaten Pasuruan yang bertetangga dengan Probolinggo dijuluki Kota Santri karena banyak terdapat pesantren salaf.

Berbagai inovasi terhadap kurikulum yang dilakukan secara mandiri oleh beberapa pondok pesantren layak diapresiasi. Kolaborasi semua lapisan masyarakat juga merupakan elemen penting yang dapat memberi legitimasi penuh pada kaum cendekiawan untuk memperbaiki sistem kurikulum di komunitas pendidikan Islam, dan inovasi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang tepat dan yang penting adalah proses pengembangan kurikulum di pesantren mesti berjalan secara alami mengikuti kultur domestik pesantren. Salah satu prinsip pengembangan kurikulum yang rasional adalah prinsip fleksibilitas,²¹ yang intinya menjelaskan bahwa kurikulum tidaklah kaku. Dalam tataran praktis dapat diartikan bahwa dalam penyelenggaraan proses pendidikan harus diperhatikan pula perbedaan yang ada. Pesantren misalnya, sebagai sebuah lembaga pendidikan

²⁰ Manfred Ziemex, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, terj. Butche B. Soendjojo, (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1996), hlm. 124

²¹ Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), Edisi. 1, Cet. 1, hlm. 53

khas Islam tidak bisa dipaksakan untuk sepenuhnya mengikuti kurikulum yang digunakan secara luas.²²

Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.2 tahun 1989 pasal 37 tentang kurikulum disebutkan sebagai berikut:

“Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan.”²³

Nampak jelas dalam undang-undang tersebut ada kalimat ‘...kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional...’ yang dapat ditafsirkan bahwa kurikulum harus disusun atau direncanakan sedemikian rupa sehingga mengakomodir segala sesuatunya tentang lingkungan peserta didik. Lebih spesifik lagi misalnya, salah satu kebutuhan pembangunan nasional adalah sumber daya manusia (SDM) yang berakhlak mulia, dan pesantren memiliki cara sendiri untuk memenuhi kebutuhan itu. Undang-undang yang legitimated ini harus disikapi secara konsisten agar tujuan pendidikan yang ‘mencerdaskan’ bisa terwujud dan bermanfaat bagi semua pihak.

Berangkat dari heterogenitas problematika kurikulum yang dihadapi pesantren selama ini, ada beberapa hal menarik dari pondok pesantren Zainul Hasan yang bagi penulis perlu untuk dicermati. Pertama, daya tahan kurikulum pesantren Zainul Hasan dalam menghadapi perubahan sosial dua dekade terakhir

²² Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Ed. Sayed Mahdi (Jakarta: Erlangga, 2017), hlm. 110

²³ Undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No.2 Th. 1989) dan Peraturan Pelaksanaannya

cukup baik dan teruji. Kedua, keberanian pesantren yang langsung memadukan sistem pembelajaran tradisional dengan kurikulum konvensional patut diberi apresiasi. Ketiga, munculnya kompetitor baru dalam bentuk sekolah-sekolah unggulan dengan sistem boarding school yang menawarkan kurikulum internasional di samping penekanan terhadap kajian keagamaan, tidak menyurutkan langkah pesantren Zainul Hasan untuk terus berperan bagi perkembangan pendidikan nasional.

Dari beberapa alasan dan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan dorongan bagi kalangan akademisi agar secara konsisten mau berperan serta demi terbentuknya pesantren-pesantren berkualitas dan kompetitif dalam menghadapi era baru bernama globalisasi yang sarat dengan kepentingan sehingga akhirnya dapat mengangkat derajat pesantren dalam ruang lingkup pendidikan (Islam) khususnya.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Kurikulum pada dasarnya hanyalah sebuah rancangan yang harus diterapkan pada suatu sistem pendidikan, terlepas bagaimana kondisi sosial politik suatu masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka beberapa masalah yang hendak diteliti teridentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengembangan kurikulum yang diterapkan di pondok pesantren Zainul Hasan dalam meningkatkan sistem pendidikannya?
2. Adakah kecenderungan inovasi kurikulum di pondok pesantren Zainul Hasan hanya mengikuti trend sekolah-sekolah unggulan?

3. Dapatkah pondok pesantren Zainul Hasan mempertahankan dan mempertanggungjawabkan dinamika kurikulumnya di tengah berbagai isu yang kerap menyudutkan pesantren belakangan ini?
4. Sudahkah kualitas lulusan pesantren Zainul Hasan memenuhi kriteria-kriteria yang diinginkan masyarakat saat ini?

Merujuk pada identifikasi masalah tersebut di atas, penelian ini kiranya perlu penulis batasi, dengan demikian diharapkan menjadi jelas konteks apa saja yang akan menjadi inti permasalahan. Secara garis besar penelitian ini penulis batasi pada:

1. Langkah yang dilakukan pondok pesantren Zainul Hasan dalam mengembangkan sistem pendidikannya agar tetap dinamis dalam menghadapi peta perubahan sosial.
2. Dinamika kurikulum pendidikan nasional dan tuntutan masyarakat terhadap proses pengembangan kurikulum di pondok pesantren Zainul Hasan Genggong.
3. Kegiatan-kegiatan edukatif sebagai penunjang kurikulum utama pondok pesantren Zainul Hasan.
4. Kualitas output yang dihasilkan pesantren Zainul Hasan Genggong dengan kurikulum inovatif.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari beragam problematika yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini, khususnya pesantren, maka masalah yang akan dikupas pada penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses pengembangan kurikulum pesantren di pondok pesantren Zainul Hasan Genggong ?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pengembangan kurikulum pesantren di pondok pesantren Zainul Hasan Genggong ?
3. Apa yang menjadi solusi dari kendala dalam pengembangan kurikulum pesantren di pondok pesantren Zainul Hasan Genggong ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan penting, antara lain;

1. Memperoleh informasi bagaimana pengembangan kurikulum pesantren di pondok pesantren Zainul Hasan Genggong.
2. Mengungkapkan kendala dalam mengelola kurikulum di pesantren Zainul Hasan Genggong
3. Mendapatkan informasi tentang solusi dalam menanggulangi kendala pengembangan kurikulum di pesantren Zainul Hasan Genggong.

E. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya beberapa tujuan tersebut di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran kepada kalangan akademisi dan penentu kebijakan dalam bidang pendidikan, terutama persoalan kurikulum. Penelitian ini mungkin bukan gagasan cemerlang dan bukan yang pertama dalam wilayah pesantren, tapi paling tidak memberikan sedikit ‘informasi solutif’ bagi sistem pendidikan Islam umumnya dan dapat bermanfaat bagi penulis pribadi. Karena seperti disebutkan oleh Saifullah Maksum, telah terjadi penyurutan peran pesantren karena tidak mengadakan perubahan yang

mendasar, sementara kondisi dan tuntutan kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang sangat cepat.

Selain itu diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai; 1) masukan bagi para pengelola, pecinta pesantren dalam memelihara dan meningkatkan pendidikan di lingkungan pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, 2) bahan kajian bagi instansi atau lembaga yang terkait fungsinya untuk turut mengelola berbagai kegiatan pendidikan dan pondok pesantren, 3) bahan masukan bagi pengembangan ilmu terutama dalam wawasan keterpaduan wawasan pendidikan sekolah dengan pendidikan pesantren dan keterampilan fungsional sebagai pendidikan luar sekolah.

F. Kajian Teoritik

1. Pengertian dan Sejarah Pondok Pesantren

Pesantren diartikan sebagai “tempat belajar para santri”. Pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bamboo. Disamping arti di atas, kata “pondok” juga berasal dari bahasa Arab “funduq” yang berarti rumah penginapan atau hotel.²⁴ Kata pesantren berasal dari akar kata “santri” yaitu istilah yang digunakan bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama di lembaga pendidikan Islam tradisional di Jawa. Kata santri mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti tempat para santri menuntut ilmu.²⁵

²⁴ Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 40

²⁵ Hanun Asrohah, *Pelebagaan Pesantren Asal-Usul dan Perkembangan Pesantren di Jawa*, (Jakarta: DEPAG, 2004), hlm. 30

Menurut Nurcholis Madjid, ada dua pendapat yang bisa dipakai sebagai acuan asal-usul perkataan santri. Pendapat pertama mengatakan bahwa “santri” berasal dari kata *sastri* dari bahasa *sansekerta* yang artinya “melek huruf”. Pada masa dahulu, pada permulaan tumbuhnya kekuasaan politik Islam Demak, kaum santri adalah kelas *literary* (melek huruf) bagi orang Jawa. Hal ini disebabkan pengetahuan mereka tentang agama melalui kitab-kitab bertulisan bahasa Arab. Dari sini dapat diasumsikan bahwa menjadi santri berarti juga tahu agama (melalui kitab-kitab tersebut).

Seorang santri minimal dapat membaca al-Qur'an dengan sendirinya dan sikap serius dalam memandang dan mengamalkan agama. Pendapat kedua menyebutkan bahwa kata *santri* berasal dari bahasa Jawa *cantrik*, artinya seseorang yang mengabdikan kepada guru. *Cantrik* selalu mengikuti kemana saja gurunya menetap. Tujuan *cantrik* dapat belajar dari guru mengenai suatu keahlian. Kebiasaan *cantrik* sebenarnya masih berlangsung sampai sekarang, tetapi tidak seperti masa lampau. Misalnya seorang yang ingin menguasai keahlian atau kepandaian dalam pewayangan, menjadi dalang atau penabuh gamelan. Seseorang tersebut akan mengikuti seseorang yang sudah ahli, di bidang pewayangan. Pada proses evolusi selanjutnya, istilah guru *cantrik* berubah menjadi guru *santri*. Karena guru dipakai secara luas, untuk guru yang terkemuka kemudian digunakan kata *kiai*, yang mengandung arti tua atau sakral, keramat, dan sakti. Pada perkembangan selanjutnya dikenal istilah *kiai santri*.

Sejalan dengan pengertian pesantren di atas, pembangunan pesantren didorong oleh kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga pendidikan lanjutan. Namun, faktor guru yang memenuhi persyaratan keilmuan sangat menentukan tumbuhnya suatu pesantren. Pada umumnya, berdirinya suatu pesantren diawali dari pengakuan masyarakat akan keunggulan dan ketinggian ilmu seseorang guru atau kiai. Karena keinginan menuntut ilmu dari guru tersebut, masyarakat sekitar bahkan orang dari luar daerah datang kepada kiai untuk belajar. Kemudian mereka membangun tempat tinggal yang sederhana disekitar tempat tinggal guru.²⁶

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua yang berfungsi sebagai salah satu benteng pertahanan umat Islam, pusat dakwah dan pusat pengembangan masyarakat muslim di Indonesia.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang bertujuan untuk *tafaqquh fi al-din* (memahami agama) dan membentuk moralitas umat melalui pendidikan. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki akar secara historis yang cukup kuat, sehingga menduduki posisi relatif sentral dalam dunia keilmuan. Adapun unsur dari pesantren adalah kiai, santri, masjid, pondok dan kitab-kitab Islam klasik. Kehadiran pesantren dikatakan unik karena dua alasan. Pertama, pesantren hadir untuk merespon situasi dan kondisi suatu masyarakat yang dihadapkan pada runtuhnya sendi-sendi moral atau bisa disebut perubahan sosial. Kedua, didirikannya pesantren

²⁶ Enung K. Rukiati dan Fenti Hikmawati, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 103

adalah untuk menyebar luaskan ajaran universalitas Islam ke seluruh pelosok nusantara.

2. Pengertian Inovasi Kurikulum Pesantren

Makna inovasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal baru, pembaharuan, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau ide). Inovasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses di mana organisasi-organisasi memanfaatkan keterampilan-keterampilan dan sumber-sumber daya mereka untuk mengembangkan barang-barang dan jasa-jasa baru, serta mengembangkan produk dan sistem-sistem pengoperasian baru. Sehingga yang dimaksud dengan inovasi adalah suatu penemuan yang berasal dari suatu perubahan.

Dalam budaya pesantren seorang kyai memiliki berbagai macam Inovasi kurikulum pesantren dapat diartikan sebagai inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan pesantren. Inovasi pesantren ialah suatu ide, barang, metode, yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) baik berupa hasil penemuan (*invention*), atau *discovery* yang digunakan untuk mencapai tujuan atau untuk memecahkan masalah pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren merupakan suatu sistem sosial yang kompleks. Oleh karena itu, inovasi mencakup hal-hal yang berhubungan dengan sub sistem pendidikan

pesantren, termasuk kurikulum, madrasah umum, madrasah diniyah, perguruan tinggi atau komponen pendidikan lainnya.²⁷

Tujuan utama inovasi adalah berusaha meningkatkan kemampuan yakni kemampuan dari sumber tenaga, uang, sarana dan prasarana termasuk struktur dan prosedur organisasi.²⁸

Adapun tujuan inovasi lainnya yakni pembaharuan pendidikan sebagai tanggapan baru terhadap masalah-masalah pendidikan dan sebagai upaya untuk mengembangkan pendekatan yang efektif dan ekonomis.²⁹ Inovasi kurikulum akan selalu melibatkan sistem inovasi yang mengkaji tentang tahapan persiapan dan implementasi inovasi kepada masyarakat dengan melibatkan berbagai unsur yang saling terkait. Dalam sistem ini juga dikemukakan bagaimana ide lahir, dikembangkan dan dikomunikasikan sampai tahap adopsi dan penyelarasan inovasi dengan situasi masyarakat yang mengadopsinya.

G. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu ini berisi mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan judul yang akan diteliti. Adapun penelitian terdahulu ini terdiri dari tesis, disertasi, dan jurnal. Penjelasan lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Siyono dengan judul “*Relevansi Kurikulum Pondok Pesantren dengan Era Globalisasi di Pondok Pesantren Al-*

²⁷ Sulthon Masyhud dan Moh. Khusnurdilo, *Manajemen Pondok Pesantren* (Jakarta: Diva Pustaka, 2005), hlm. 65

²⁸ Hasbullah. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 190

²⁹ *Ibid.*, hlm. 201-202

Manar dan Pondok Pesantren Mas'udiyyah". Adapun rumusan masalah tesis ini adalah: (1) bagaimana kurikulum yang diterapkan di pondok pesantren Al-Manar dan Pondok Pesantren Mas'udiyyah? (2) apa landasan pengembangan kurikulum di Pondok Pesantren Al-Manar dan Pondok Pesantren Mas'udiyyah? (3) apa kurikulum yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Manar dan Pondok Pesantren Al-Mas'udiyyah masih relevan dengan era globalisasi?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sedangkan hasil penelitian ini adalah: (1) kurikulum yang diterapkan di pondok pesantren Al-Manar dan Pondok Pesantren Mas'udiyyah meliputi kurikulum salaf dan khalaf. (2) landasan pengembangan kurikulumnya adalah undang-undang RI No.20 tahun 2003. (3) kurikulum Pondok Pesantren Al-Manar dan Pondok Pesantren Mas'udiyyah masih relevan karena kurikulum yang ada terbuka kepada seluruh masyarakat umum, mudah dalam pendidikan, serta penguasaan bahan ajar.³⁰

Kedua, tesis dengan judul *"Pondok Pesantren dan Tantangan Globalisasi (Upaya Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Sumatera Utara dalam Mempertahankan Sistem Tradisional)"* yang ditulis oleh Hermawan Putra. Rumusan masalah tesis ini adalah seberapa jauh globalisasi mempengaruhi sistem pendidikan yang bernuansa tradisional yang melekat pada pesantren Muthafawiyah Purba Baru dan bagaimana upaya mengantisipasi arus globalisasi. Dalam hal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi-antropologi. Adapun hasil penelitian ini, globalisasi tidak berpengaruh

³⁰ Siyono, *"Relevansi Kurikulum Pondok Pesantren dengan Era Globalisasi"* (Tesis--IAIN Salatiga, Salatiga, 2016)

pada wilayah akidah komunitas pondok. Akan tetapi globalisasi berpengaruh pada kehidupan santri, pendidik, lembaga, metode, evaluasi.³¹

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Ali Mu'tafi dengan judul "*Rekonstruksi Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Tradisional di Indonesia (Telaah Kurikulum Pondok Pesantren Menuju Arah Baru Pendidikan Islam di Era Globalisasi)*". Rumusan masalah jurnal ini yakni bagaimana sistem pendidikan pondok pesantren menuju arah baru pendidikan Islam di Era Globalisasi. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah perlunya merekonstruksi pesantren yang mengarah pada 3 hal yang meliputi: pesantren harus tetap sebagai lembaga pengkaderan ulama, pesantren tetap sebagai lembaga khusus dalam pengkajian Islam, dan pesantren harus menerapkan kurikulum ilmu pengetahuan umum serta keterampilan di bidang teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keempat, disertasi yang ditulis oleh Ahyar dengan judul "*Manajemen Inovasi Pembelajaran pada Kelas Unggulan (Studi Multisitus di MTsN Model Praya dan MTsN 1 Model Mataram)*". Rumusan masalah disertasi ini adalah: 1) bagaimana konseptualisasi inovasi pembelajaran yang meliputi pendekatan kurikulum, metode, media, dan waktu pada kelas unggulan, 2) bagaimana implementasi fungsi-fungsi manajemen inovasi pembelajaran pada kelas unggulan, dan 3) bagaimana implikasi manajemen inovasi pembelajaran pada kelas unggulan. Adapun hasil penelitiannya meliputi:

³¹ Hermawan Putra, "*Pondok Pesantren dan Tantangan Globalisasi (Upaya Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Sumatera Utara dalam Mempertahankan Sistem Tradisional)*" (Tesis – UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009)

- 1) Pembelajaran pada kedua MTsN tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik, disebabkan masih ada guru yang kurang memiliki persepsi dan pemahaman yang utuh tentang konsep inovasi pembelajaran yang unggul, sehingga berdampak pada model pendekatan, metode yang kurang mencerminkan inovasi pembelajaran yang semestinya.
- 2) Implementasi fungsi-fungsi manajemen inovasi pembelajaran dijalankan melalui perencanaan inovasi pembelajaran, pengorganisasian inovasi pembelajaran, serta pelaksanaan inovasi pembelajaran.
- 3) Implikasi manajemen inovasi pembelajaran pada kelas telah memberikan kontribusi terbangunnya sistem pembelajaran yang integratif, standarisasi guru, serta reputasi madrasah.³²

Kelima, disertasi yang ditulis oleh Budi Susanta dengan judul *“Perkembangan Inovasi Pendidikan Agama islam (PAI) pada Sekolah Akselerasi SMP Negeri 1 Muntilan”*. Adapun rumusan masalah disertasi ini yakni: 1) bagaimana pembelajaran PAI pada sekolah akselerasi SMP Negeri 1 Muntilan, 2) bagaimana model inovasi pembelajaran PAI pada sekolah akselerasi SMP Negeri 1 Muntilan, 3) bagaimana perkembangan inovasi pembelajaran PAI pada sekolah akselerasi SMP Negeri 1 Muntilan. Sedangkan hasil penelitiannya yakni: 1) pembelajaran PAI ada yang melaksanakan akselerasi pembelajaran PAI (akselerasi SK, KD, dan proses pembelajaran). 2) memilih siswa superior (S),

³² Ahyar, *“Manajemen Inovasi Pembelajaran pada Kelas Unggulan (Studi Multisitus di MTsN Model Praya dan MTsN 1 Model Mataram)”* (Disertasi – UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015).

mengubah waktu dan pelaksanaan RPP dari 3 tahun ke 2 tahun, menetapkan KKM 80, serta meningkatkan kelas akselerasi bernuansa Islami (NI) dengan singkatan model SUNNI. 3) perkembangan inovasi pembelajaran PAI pada sekolah akselerasi dengan model SUNNI ditemukan lambat.³³

Dari penelitian terdahulu tersebut, ada persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam segi judul. Akan tetapi terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang telah ada. Sebagaimana dua disertasi di atas meneliti tentang inovasi kurikulum yang ada di sekolah formal.

Selain itu, dua tesis di atas meneliti tentang relevansi kurikulum dan tantangan pesantren di era global. Tidak lain dari hal tersebut, jurnal di atas meneliti tentang rekonstruksi pesantren di era globalisasi yang hanya mencakup tentang kurikulum. Kaitannya dengan penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis akan meneliti tentang bentuk inovasi Pondok Pesantren Sunan Drajat Banjaranyar Paciran dan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sendangagung Paciran Lamongan dalam menghadapi era globalisasi khususnya dalam kurikulum, sarana dan prasarana, dan jaringan kerjasama.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis maka kerangka penulisan akan terdiri dari bab-bab, yang kemudian tiap masing-masing bab terurai lagi dalam sub- bab. Secara garis besar formulasi kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:

³³ Budi Susanta, “Perkembangan Inovasi Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah Akselerasi SMP Negeri 1 Muntilan” (Disertasi -- UNMUH, Yogyakarta, 2014)

Bab pertama berisi Pendahuluan yang memaparkan tentang Latar Belakang Permasalahan, Identifikasi Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Pada bab ini pula terangkum secara garis besar mengenai runutan penelitian.

Bab kedua yakni deskripsi mengenai Pondok Pesantren dan Kurikulum Inovatif: Sebuah Integrasi Ideal, meliputi: Karakteristik Pondok Pesantren termasuk Pengertian Pesantren dan Klasifikasi Pesantren. Kemudian pembahasan tentang ruang lingkup Kurikulum, meliputi Pengertian Kurikulum baik secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi), Komponen-komponen Kurikulum, Jenis-jenis Kurikulum, Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum, dan Asas-asas Kurikulum. lalu paparan tentang Kurikulum Inovatif.

Bab ketiga adalah pemaparan tentang Profil Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo; yang meliputi Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren, Kondisi Geografis Pondok Pesantren, Visi & Misi Strategis Pondok Pesantren, Gambaran Umum Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren yang meliputi; Jenjang Pendidikan, dan Keadaan Santri, Pengurus, Tenaga Pengajar dan Prestasi Pesantren. Lalu Sistem Pendidikan Pesantren.

Bab keempat yaitu Pola Pengembangan Kurikulum dan Pengajaran Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Dalam bab ini dibahas antara lain; Pesantren Zainul Hasan di Tengah Perubahan Kurikulum Nasional: Sebuah Tinjauan Historis, lalu Analisis Komponen-komponen Pengembangan Kurikulum di Pondok Pesantren Zainul Hasan yang terdiri dari; Orientasi dan

Tujuan Kurikulum Pesantren, Rasionalitas Muatan Kurikulum Pesantren, Fleksibilitas Pengembangan Kurikulum, dan Evaluasi Kurikulum Pesantren. Selanjutnya Lembaga-lembaga Fungsional Penggerak Kurikulum dan Pengajaran Pondok Pesantren Zainul Hasan, Program-Program Edukatif Penunjang Kurikulum, dan Dampak Kurikulum Inovatif Terhadap Kualitas Pendidikan Pesantren, Prestasi Santri dan Mutu Alumni.

Bab kelima ialah Penutup, yang memuat Kesimpulan dan Saran-saran. Pada bab ini akan ditampilkan sejauh mana penelitian ini dan kajian lanjutan seperti apa yang dibutuhkan. Selanjutnya juga terdapat daftar pustaka dan lampiran pada penghujung bab ini.

